

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)**

This page is intentionally left blank

Ti Aisyah, S. Sos, M.Si
Teuku Alfiady, S.Sos, MSP
Fauzi, S. Sos, MA

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(Studi di Kecamatan Sawang)

Unimal *Press*

Ti Aisyah, Teuku Alfiady, Fauzi

**Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan:
Studi di Kecamatan Sawang, Aceh Utara**

Unimal Press

viii + 56 hlm; 155 x 230 mm (UNESCO Standard)

ISBN 978-602-1373-11-8

Universitas Malikussaleh: Jl. Panglatah No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe
P.O. Box 141,
Nanggroe Aceh Darussalam
INDONESIA

☎ +62-0645-41373-40915

☎ +62-0645-44450

Alamat Penerbit:

Unimal Press

Jl. Panglatah No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe 24351
Nanggroe Aceh Darussalam, INDONESIA

☎ +62-0645-47146; +62-0645-47512

Contact person:

081317658142

Email:

unimalpress@unimal.ac.id

unimalpress@gmail.com

Website:

www.unimal.ac.id/unimalpress

Hak Cipta © 2014, Ti Aisyah, S.Sos, M.Si, Teuku Alfiady, S.Sos, MSP, Fauzi, S.Sos, MA
All rights reserved.
**Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan:
Studi di Kecamatan Sawang, Aceh Utara**

Penulis:

**Ti Aisyah, S.Sos, M.Si,
Teuku Alfiady, S.Sos, MSP,
Fauzi, S.Sos, MA**

Editor:

Hak Penerbitan:

Unimal Press

Layout dan Design Cover:

Al Chaidar

Dicetak oleh:

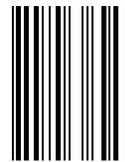
Unimal Press

Cetakan Pertama:

Maret 2014

ISBN 978-602-1373-11-8

ISBN 602137311-1



No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

KATA PENGANTAR

Buku Evaluasi Perkembangan Program PNPM ini merupakan sebagai suatu pembahasan hasil penelitian mengenai hasil evaluasi realisasi kegiatan PNPM baik kegiatan fisik, ekonomi (kegiatan simpan Pinjam Perempuan), dampak manfaat program bagi masyarakat, dan tingkat kemampuan pelaku dalam mengelola program, dukungan /partisipasi masyarakat dan koordinasi pihak kecamatan dengan pelaku PNPM di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Buku ini juga menjelaskan permasalahan-permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan mekanisme penanganan masalah dalam program PNPM.

Semoga buku ini dapat menjadi masukan dan manfaat bagi pembaca dan terima kasih atas saran serta kritikan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Juni 2014.

**Ti Aisyah, S.Sos, M.Si,
Teuku Alfiady, S.Sos, MSP,
Fauzi, S.Sos, MA**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Fokus Penelitian :	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	5
2.1 Ekonomi Kerakyatan.....	5
2.2 Pemberdayaan Rakyat.....	5
2.3 Partisipasi Masyarakat.....	7
2.4 Kemiskinan	10
2.5 Pembangunan Berkelanjutan.....	12
2.6 Kebijakan Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	16
3.1 Pendekatan Penelitian.....	16
3.2 Tehnik Pengumpulan Data.....	16
3.3 Proses Analisis Data	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Keadaan Geografis Lokasi	19
4.2 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan	20
1). Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa	20
2). Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan	21
4.3 Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan meliputi :.....	24
4.4 Hasil Evaluasi Kegiatan Program PNPM-MPd di Kecamatan Sawang	24
4.5 Mekanisme Penanganan Permasalahan Dalam Program PNPM MP.....	33
4.6 PEMBAHASAN	40
Hasil Evaluasi Kegiatan Program PNPM di Kecamatan Sawang.....	40
Mekanisme Penanganan Permasalahan Dalam Program PNPM-MPd di Kecamatan Sawang	43

Bab 5 KESIMPULAN.....	45
BIBLIOGRAFI.....	47
Lampiran 1.....	48
BIODATA Tim Penulis.....	51

This page is intentionally left blank

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah diupayakan harus bisa memanfaatkan segala potensi daerahnya masing-masing baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun letak geostrategisnya sehingga hasil-hasil pembangunan diharapkan sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Diperlukan pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional. Namun persoalannya potensi sumberdaya manusia di banyak daerah baik dari kuantitas dan kualitasnya masih sangat terbatas sehingga masih diperlukan pembangunan kualitas manusianya dalam berbagai aspek yang mendukung melalui kucuran program-program pembangunan, di samping itu juga perlu peningkatan pembangunan sarana prasarana dasar penunjang ekonomi masyarakat lokal.

Pembangunan yang menitik beratkan pada kualitas manusianya adalah pembangunan yang menjadikan manusianya sebagai subjek pembangunan. Sumberdaya manusia menjadi aktor dan sekaligus fokus tujuan pembangunan. Pembangunan masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas bersama untuk memenuhi tujuan bersama di antara warganya. Melalui proses pembangunan masyarakat diupayakan dapat menciptakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan semakin berpotensi setiap individu manusia dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun apabila sebaliknya maka akan ditemukan adanya berbagai bentuk masalah sosial diantaranya peningkatan kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.

Persoalan Kemiskinan dan pengangguran adalah dua-dua permasalahan yang perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, dan pihak lainnya. Diperlukan Langkah

kongkrit pembangunan pengentasan kemiskinan yang ditempatkan sebagai prioritas dalam penanganannya, apapun bentuk pertimbangan penanganan kemiskinan perlu segera ditempuh dalam tindakan dan langkah-langkah nyata. ‘

Pemerintah dalam menangani tingkat kemiskinan masyarakat telah banyak meluncurkan program-programnya, diantaranya program bantuan beras raskin, program ketahanan pangan, program bantuan JPS, dll namun ironisnya mengapa kemiskinan masyarakat belum dapat tertanggulangi dengan maksimal. Maka upaya untuk menanggulunginya diperlukan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut dalam mengurangi angka kemiskinan telah mengucurkan **Program Pemberdayaan Masyarakat**.

Aceh merupakan salah satu Wilayah yang masih tinggi angka kemiskinan. Jumlah keluarga miskin di Aceh Tahun 2011 tercatat berjumlah 634.967 rumah tangga 60 % dari total rumah tangga di Aceh yaitu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) disampaikan oleh syekh Suhaimi/Ketua BPS Aceh, Agustus 2011).

Kemiskinan penduduk Aceh disebabkan banyak faktor diantaranya faktor struktural yaitu kebijakan yang diambil pemerintah masa lalu sering kurang memberi peluang kepada masyarakat miskin dalam akses ekonomi karena diberatkan oleh persyaratan yang tak dapat terakses oleh rumah tangga miskin. Faktor lainnya adalah Budaya yang masih melekat pada masyarakat miskin yang belum sepenuhnya menuju perubahan diantaranya budaya malas, pasrah pada nasib.

Motivasi yang masih rendah, Kesadaran individu masyarakat miskin dalam mengembangkan diri untuk maju juga masih rendah, menjadi persoalan tersendiri dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sehingga untuk memperoleh output dari Program lebih maksimal diperlukan kesungguhan dan komitmen pelaku pemberdayaan untuk melaksanakan program - program kegiatan melalui peningkatan kemampuan, kreativitas dan motivasi masyarakat yang lebih baik dan perlu dukungan penuh dari pejabat daerah/kabupaten/kota dan kecamatan sehingga hasil-hasil program dapat memberi perubahan yang lebih baik kepada kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin.

Sejak tahun 1998 Provinsi Aceh telah terlibat dalam program pemberdayaan yang pada tahun tersebut menggunakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) hingga tahun 2006. Atas keberhasilan tersebut program pemberdayaan menjadi issue utama pemerintah pusat dengan mensinergikan ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan digulirkan secara Nasional pada April 2007 dan terus dilaksanakan hingga saat ini.

Propinsi Aceh salah satu propinsi yang mendapatkan kucuran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MPd). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini adalah program program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kecamatan Sawang adalah salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh yang mendapat kucuran dana program PNPM- Mandiri Perdesaan. Besarnya kucuran dana untuk tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 sebesar 2 Milyar 250 juta , tahun 2011 berjumlah 3 milyar, sedangkan tahun 2012 sebesar 3 milyar. Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sawang telah disusun beberapa program kegiatan prioritas dalam rangka meningkatkan kemajuan pembangunan Sarana/Parsarana dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program PNPM MPd umumnya di Kecamatan- kecamatan yang ada di Aceh terutama kecamatan pedalaman adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola program dengan SDM yang masih rendah. Kecamatan Sawang adalah salah satu kecamatan pedalaman dengan kondisi gampong yang luas dan terdiri dari perbukitan, iklim yang tidak stabil, kondisi Sumber Daya Masyarakat masih rendah, dan tingkat mutu hidup juga masih rendah sehingga akan berdampak pada hasil kegiatan program.

Permasalahan lainnya adalah kemampuan dari pelaku pendukung program yang ada di desa/gampong seperti Tim pengelola Kegiatan (TPK) dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa(KPMD) SDM nya juga masih sangat terbatas dan masih rendahnya partisipati masyarakat ini akan menjadi persoalan tersendiri dalam mengelola program dan

berdampak terhadap hasil realisasi kegiatan dan kemajuan program. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap Progres kegiatan program PNPM –MPd pada masing-masing gampong di semua kecamatan diperlukan koordinasi yang baik, yang dibangun antar pelaku baik tingkat gampong, Kecamatan dan kabupaten. Dalam hal ini untuk memperoleh hasil kegiatan program di setiap gampong / Kecamatan yang lebih maksimal diperlukan kemampuan para pelaku baik ditingkat gampong dan kecamatan untuk dapat menggerakkan semua unsur yang ada dalam meningkatkan kinerja masing-masing, membangun koordinasi, perlu penanganan yang serius pada semua aspek yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan output dan tujuan program.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hasil Evaluasi Kegiatan Program PNPM di Kecamatan Sawang.?
2. Bagaimana Mekanisme Penanganan Permasalahan Dalam Program PNPM-MPd di Kecamatan Sawang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Menyangkut dengan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hasil Evaluasi Kegiatan Program PNPM di Kecamatan Sawang.?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Penanganan Permasalahan Dalam Program PNPM-MPd di Kecamatan Sawang.?

1.4 Fokus Penelitian :

1. Bagaimana Hasil Evaluasi Kegiatan Program PNPM di Kecamatan Sawang.?
2. Bagaimana Mekanisme Penanganan Permasalahan Dalam Program PNPM-MPd di Kecamatan Sawang.?

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi rakyat yang dibahas oleh Indrawijaya dan pranoto berdasarkan pendapat Swasono adalah sebagai berikut : “ (1) Rakyat yang secara partisipatori – emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai-nilai ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan”. (2) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (self – Empowering) sehingga rakyat mampu meraih “nilai tambah ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial.

- (3) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam negeri yang tersedia. Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (4) Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada platform bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara dan seterusnya”.

2.2 Pemberdayaan Rakyat

Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara. Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan. Pemberdayaan akan menjadi masalah bila secara konseptual bersifat zerosum, maksudnya proses pemberdayaan itu dibarengi oleh adanya power kelompok terhadap kelompok lainnya.

Menurut Indrawijaya dan Pranoto (2011) “pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan”.

Sumodiningrat dalam Indrawijaya dan Pranoto, memberi pengertian pemberdayaan adalah “ memberi daya bukan kekuasaan. Sehingga istilah empowermen (konsep barat) tidak tepat di Indonesia karena lebih bermakna pemberian kekuasaan dari pada pemberdayaan itu sendiri. Istilah yang tepat menurutnya adalah “energi”. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Winarni dalam Sulistiani juga memberi pemaknaan, “konsep pemberdayaan yang intinya adalah mencakup tiga hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. Hakikat pemberdayaan adalah iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang”. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Sulistiyani dalam hal ini menyimpulkan akar pemahaman adalah sebagai berikut :

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
2. Pemberdayaan adalah merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

Menurut Pambudi dkk, Konsep Pemberdayaan apabila dilihat dari dua sisi yaitu sisi pertama tidak punya (tidak memiliki) kekuatan, ke dua kehilangan kekuatan. Keterbatasan rakyat dari apa yang

seharusnya dimiliki diantaranya : kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya, kesadaran, partisipasi, kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan. Menurut beliau ini semua merupakan ketimpangan relasi kuasa”.

Ginanjari Kartasmita dalam Indrawijaya (2011) upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu : (1) Pemungkinan (*enabling*) yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. (2). Penguatan (*empowering*) yakni dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri. (3) Perlindungan (*protecting*) harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

Ife, Jim dan Tesoriero, (2008), menjelaskan “pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan”.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dicapai secara optimal bila masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan dalam setiap tahap pembangunan.

Asumsi dasar mengapa partisipasi masyarakat itu penting? Pertama adalah masyarakat itu sendiri yang paling memahami apa yang terbaik untuk mereka atau bersifat subjektif dimana masyarakat itu sendiri menentukan ukuran-ukurannya termasuk cara-cara untuk mencapainya, ke dua adalah masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi hajat hidup mereka. Yang secara implementasi partisipasi masyarakat lebih dianggap sebagai upaya pemenuhan hak-hak masyarakat dan sebaliknya, pengingkaran terhadap upaya pemenuhan ini akan

dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Sanolf dalam Indrawijaya dan Pranoto (2011), partisipasi merupakan konsep yang sangat umum yang meliputi berbagai bentuk pengambilan keputusan oleh sejumlah kelompok yang terlibat. Peran serta masyarakat memiliki arti yang berbeda untuk masyarakat yang berbeda. Beliau juga menjelaskan tujuan utama dari peran serta masyarakat adalah

- 1). Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya, adalah meningkatnya kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam keputusan yang telah ada.
- 2). Menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan dalam pengambilan keputusannya guna meningkatnya kualitas dari perencanaan dan keputusannya.
- 3). Meningkatkan rasa kebersamaan (*sense of community*). Dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam identifikasi masalah dan perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena masyarakat sudah terlibat dalam proses pembuatan dan perumusan, dengan demikian masyarakat ikut merasa memiliki program tersebut, ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program, dan memiliki motivasi untuk berpartisipasi pada tahap keberlanjutannya. Maka partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program karena kesadaran bukan karena dimobilisasi pihak eksternal.

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dan pengelolaan program akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, kemandirian masyarakat akan tumbuh dari proses pembelajaran pengelolaan program-program, termasuk pengelolaan program-program pembangunan pada tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi program akan membawa dampak positif terhadap proses penyempurnaan dan umpan balik yang diharapkan pada perbaikan suatu program yang

sedang dijalankan dan penyempurnaan program-program selanjutnya. Dengan demikian melalui proses partisipasi akan membentuk proses pembelajaran sambil bekerja secara berkesinambungan kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil merupakan suatu hal penting, karena dampak menumbuhkan rasa kepuasan kepada masyarakat, karena merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam hal ini hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.

Menurut Soetomo (2008) partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah “keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut yang dilandasi oleh kesadaran dan determinasi”. Beliau juga menjelaskan keterlibatan tanpa didorong oleh rasa kesadaran dan determinasi tidak dapat disebut sebagai partisipasi.

Mikkelsen dalam Soetomo (2008) menginventarisir ada enam tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi. “Pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Ke dua, partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ke tiga, partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Ke empat, partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Ke lima, partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Ke enam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka”.

2.4 Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Terkait dengan kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan baik akademisi, para praktisi, dan para pemerhati, untuk mencari solusi penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dapat dibedakan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Berkenaan dengan permasalahan kemiskinan pedesaan dan perkotaan, pedesaan seringkali lebih mengekspresikan kemiskinan absolut, sedangkan perkotaan lebih identik dengan kemiskinan struktural.

Sulistiyani (2004) dengan memperhatikan definisi kemiskinan dari Sudibyo dkk menjelaskan sebagai berikut:

“Kemiskinan absolut terletak permasalahannya adalah pada kondisi masyarakat yang tidak berdaya untuk memenuhi lima kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar. Sedangkan kemiskinan struktural adalah letak permasalahannya adalah pada ketidak terjangkau akses terhadap sumber ekonomi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan karena kemampuan yang dimiliki terbatas”.

Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi oleh suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor budaya.

Apapun bentuk dan jenis kemiskinan yang dihadapi baik di pedesaan maupun perkotaan yang pada hakikatnya perlu penanganan yang serius dan langkah-langkah nyata.

Berbagai teori dan konsep terus dikembangkan. Di sini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli terkait dengan kemiskinan. Menurut Siagian kemiskinan adalah merupakan suatu lingkaran setan yang mengandung komponen sebagai berikut :

- Pendapatan perkapita rendah
- Yang berakibat ketidakmampuan menabung
- Tidak terjadinya pembentukan modal
- Tidak adanya investasi

- Tidak terjadinya perluasan usaha
- Makin sempitnya perluasan kerja
- Semakin tingginya angka pengangguran
- Tidak adanya penghasilan
- Bergesarnya dari Posisi dibawah garis kemiskinan

Cambert dalam Nawawi (2006) memberikan definisikan kemiskinan sebagai berikut :

Kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkat kemiskinan, yang terdiri dari lima unsur; kemiskinan itu sendiri, Kelemahan fisik, keterasingan , kerentanan, ketidak berdayaan.

Dalam bahasan Nawawi (2006) menjelaskan bahwa ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial yaitu :

- 1). Kelompok yang paling miskin (fakir miskin), kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial,
- 2). Kelompok miskin, kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial.,
- 3). Kelompok rentan, kelompok ini memiliki kehidupan yang relatif lebih baik, namun kelompok ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya.

Definisi umum kemiskinan menurut Sulistiyani (2004) adalah

“Bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas.baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas”.

2.5 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah merupakan suatu daya upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Menurut Sulistiyani (2004) mendefinisikan “pembangunan berkelanjutan merupakan perpaduan antara bagaimana melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat suatu negara dengan sumber daya yang dimiliki sekaligus mempertimbangkan kelangsungan generasi berikutnya”.

Beliau juga menjelaskan permasalahan utama pembangunan berkelanjutan adalah memikirkan secara faktual kebutuhan masyarakat miskin berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan keterbatasan sumber daya, teknologi dan kemampuan organisasi penopangnya.

Dalam penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan nilai keterbatasan yang ada. Berarti pemakaian sumber daya sudah semestinya memperhatikan sumber daya yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat. Lingkungan hidup merupakan dimensi penting bagi pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam hendaknya berlandaskan pada upaya pelestarian, lingkungan hidup, upaya pelestarian lingkungan hidup mencakup tiga dimesi:

- Meningkatkan efisiensi pada penggunaan sarana produksi yang mengurangi permintaan terhadap berbagai jenis sumber daya alam dalam proses produksi.
- Mendorong dan memberi insentif terhadap teknologi yang mengurangi dampakatif terhadap lingkungan.
- Melakukan investasi dalam hal pemeliharaan dan pengamanan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tjokrowinoto (2007) menyimpulkan bahasan Carnea sebagai berikut : Ada perbedaan penekanan dalam interpretasi konsep sustainability yaitu :

- interpretasi pertama lebih penekanan pada perhatian pada efek pembangunan pada “*World System*” atau planet bumi kita, dan

menghendaki agar interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan kelangsungan “*world System*”.

- Interpretasi ke dua adalah penekanan perlunya interaksi antara manusia dan proyek, memperhatikan proyek *sustainable*.
- Interpretasi lain *sustainable development*, didorong oleh adanya kenyataan tingginya *mortality rate* proyek-proyek pembangunan di negara berkembang. Alokasi imput yang berkesinambungan tidak menjadikan proyek pembangunan itu berkembang dengan kekuatan sendiri.

2.6 Kebijakan Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

1). Visi Misi, Tujuan dan Prinsip –Prinsip Program PNPM MPd

Pada tahun 2007 Pemerintah mencanang Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). (PTO.2008)

Visi PNPM Mandiri perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- Peningkatan kapasitas Masyarakat dan kelembagaan
- Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi

masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas /kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Untuk masing-masing hal tersebut di atas bagaimana hasil capaiannya?

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi :

(1). Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat, (3) kegiatan peningkatan kapasitas /ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, 4). Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Usulan kegiatan yang tidak dapat didanai dari sumber dana PNPM – MPd adalah antara lain :

- (1) Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
- (2) Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
- (3) Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain).
- (4) Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya
- (5) Pembiayaan gaji pegawai negeri
- (6) Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja
- (7) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang, yang mengandung tembakau

- (8) Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam
- (9) Kegiatan pengolahan tambang
- 10. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai
- 11. Kegiatan yang berhubungan pemindahan jalur sungai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang objek yang diteliti. Menurut Danim (2002) pendekatan kualitatif adalah pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan dan memberi makna atas fenomena secara holistik dalam keseluruhan proses studi. Sedangkan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan seperangkat peristiwa / kondisi populasi saat ini yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Tentang:

“Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) Studi di Kecamatan Sawang”.

3.2 Tehnik Pengumpulan Data.

a). Wawancara.

Tehnik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang semakin terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan lebih efektif dan mendalam. Tehnik wawancara tidak dilakukan dengan struktur yang ketat.

Untuk menentukan informan menggunakan metode pengambilan sampel purposif (*purposial sampling*), ditetapkan dengan sengaja pada subjek yang dianggap menguasai dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang masalah yang diteliti sesuai

dengan gejala dan fakta yang ada di Kecamatan Sawang. Informan yang diwawancarai adalah fasilitator Kecamatan (FK/FT), Camat / Sekretaris Camat, Asisten Fasilitator Kecamatan, Geuchik/Sekdes, Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Ketua Kelompok SPP, anggota kelompok SPP, konsultan Manajemen (KM) Kabupaten dan masyarakat penerima manfaat.

b). Observasi.

Pengamatan ini dilakukan terfokus pada Evaluasi Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM-MPd di Kecamatan Sawang”.

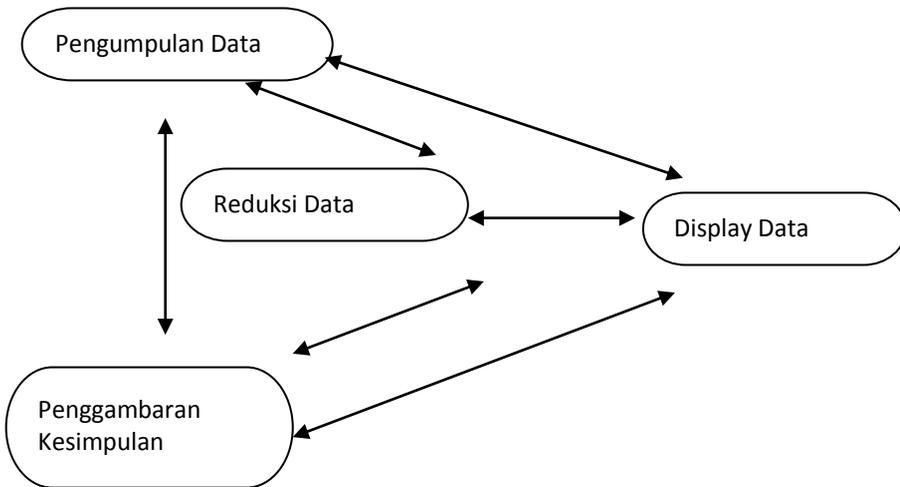
c). Penelusuran Dokumen

Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer, dengan cara mengkaji data dari dokumen (bahan-bahan tertulis) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu melalui buku-buku, majalah ilmiah, jurnal.. baik laporan penelitian yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Juga data pendukung di kantor kecamatan / FK antara lain buku petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan , Laporan kegiatan PNPM di Kecamatan Sawang di kantor Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sawang

3.3 Proses Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model interaktif. (siklus yang interaktif) guna untuk memahami dan mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci mengenai fokus permasalahan, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan induktif. Proses penelitian ini akan terurai dalam proses analisis data dengan cara reduksi Data., Display Data dan Penarikan Kesimpulan.

Gambar. Siklus Interaktif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Geografis Lokasi

Kecamatan Sawang dengan ibukotanya Sawang memiliki luas kecamatan 384,65 KM², yang terdiri dari 2 kemukiman yaitu kemukiman Sawang Selatan dan kemukiman Saang Utara dan jumlah gampong sebanyak 39, dengan batas-batas kecamatan:

Sebelah Utara dengan Kecamatan Muara Batu,

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Gandapura Kab. Biruen

Sebelah Barat dengan Kabupaten Bener Meriah

Sebelah Timur dengan Kecamatan Nisam . Kec. Muara Batu Kab.A.Utara

Letak Topografis desa terdiri dari 6 dataran dan 33 berbukit, dari 39 desa yang ada di Kecamatan Sawang 10 desa dengan posisi desa berada ditepi hutan. Luas Kecamatan Sawang seluruhnya 384,65 km yang dipergunakan untuk lahan sawah sebanyak 2.144 km dan bukan lahan sawah sebesar 36.521 km. Sesuai dengan data di kantor Camat Sawang, jumlah keseluruhan penduduk kecamatan Sawang Tahun 2009 sebanyak 32.508 orang terdiri dari laki-laki 15.615 orang perempuan sebanyak 16.893 orang dan pada tahun 2012 jumlah penduduk kecamatan sawang seluruhnya sebanyak 8.369 KK.

Pencapaian penduduk dapat kita klasifikasikan dalam beberapa jenis usaha diantaranya pertanian sebanyak 5.755 keluarga, bidang perindustrian sebanyak 275 keluarga, bidang perdagangan berjumlah 753 keluarga, bidang transportasi sebanyak 311 keluarga, dan bidang jasa dan lainnya sebanyak 1.283 keluarga. Dari data tersebut menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk tertinggi adalah di bidang pertanian, terdiri dari usaha tanaman pangan 3975 keluarga dan perkebunan 1.599 keluarga serta di bidang kehutanan sebanyak 189 orang, lain-lain 92 keluarga.

Produktivitas hasil pertanian yaitu padi, kedele, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Jenis produksi bidang tanaman hortikultura adalah kacang panjang, cabe, tomat, terong, ketimun dan bayam. Sedangkan produksi hasil tanaman perkebunan rakyat antara lain cengkeh, aren, kelapa, jahe, kunyit, pala, sagu, karet, kelapa hibrida, kelapa sawit, nilam, kopi, kapuk/randu, pinang, kakao, kemiri, dan tebu. Produksi masyarakat bidang ternak diantaranya sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, itik dan produksi tertinggi adalah ayam buras itik, dan kambing (Sawang dalam angka Tahun 2010).

Kemajuan bidang pendidikan di Kecamatan Sawang untuk wajib belajar 9 tahun fasilitas yang tersedia adalah jumlah sekolah umum antara lain Sekolah Dasar seluruhnya 28 buah, SLTP 6 buah dan SMU 1 buah. Jumlah sekolah agama, Madrasah Ibtidaiyah 6 buah, MTs 3 buah, Pesantren dan balai pengajian sebanyak 12 buah. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia, PUSKESMAS sebanyak 1 buah, PUSTU buah, Praktek Dokter 2, Polindes 4 buah, dan POSYANDU 39 buah (Sawang Dalam Angka Tahun 2010).

Kondisi sosial rumah tangga masyarakat adalah rumah tangga yang menggunakan listrik sebanyak 6,152 KK, sedangkan 2.217 tidak menggunakan listrik. Masih banyak rumah tangga yang mengkonsumsi air sungai dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebanyak 2.173 rumah tangga. Bangunan tempat tinggal yang masih menggunakan kayu/bambu sebanyak 5.325 rumah tangga.

4.2 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

1). Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa

a. Kepala Desa

Peran Kepala desa sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa BPD) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan PNPM Mandiri

Perdesaan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pelesatarian di desa.

- c. Tim Pengelola Kegiatan (TPK); TPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Mempunyai peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM Mandiri perdesaan. Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi dan keuangan program.
- d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Tugas KPMD adalah membantu pengelolaan pembangunan di desa. dan untuk propinsi Aceh jumlah KPMD per desa / gampong sebanyak 3 orang terdiri dari 2 orang kader pemberdayaan (laki-laki/perempuan) dan 1 orang kader tehnik.

2). Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan

- a. Camat;

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desa-desa di Kecamatan. Camat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Perdesaan di wilayah kecamatan, mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan. Menyenggarakan MAD, Bersama Fasilitator Kecamatan dan PJOK mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di Wilayah Kecamatan; Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, memantau pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir, menilai kinerja program di desa dan di kecamatan.

- b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

PJOK adalah seorang kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan. dan tanggung jawab pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, Menyelenggarakan rapat rutin. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan, Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi, melakukan pengawasan dan evaluasi, bersama dengan FK memfasilitasi pelaksanaan MAD, memantau dan memfasilitasi kegiatan musyawarah desa di wilayahnya.

c. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri perdesaan di Kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan, pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

d. Tim Verifikasi

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik, prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Pean Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan membuat rekomendasi kepada BKAD/MAD sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan

e. Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses diskusi MAD, serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.

f. Pendamping Lokal

Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. di setiap kecamatan di tempatkan 3 orang.

g. Fasilitator Kecamatan (FK)

Fasilitator Kecamatan merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi. Perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan.

h. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana.

i. Setrawan Kecamatan

Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah kecamatan dan tata perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.

j. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK BP-UPK

dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua, dan anggota.

4.3 Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan meliputi :

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia (memilih jenis kegiatan yang berdampak langsung kepada manusia).
- b. Otonomi (memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab)
- c. Desentralisasi (memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan sesuai dengan kapasitas masyarakat).
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin (segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin).
- e. Partisipasi (masyarakat berperan secara aktif dalam proses tahapan program dan pengawasannya).
- f. Kesetaraan dan keadilan gender (masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program).
- g. Demokratis (Masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah).
- h. Transparansi dan Akuntabel (masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan)
- i. Prioritas (Memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan pemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan)
- j. Keberlanjutan (Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan sistem pelestariannya).

4.4 Hasil Evaluasi Kegiatan Program PNPM-MPd di Kecamatan Sawang

Evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk

menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Tingkat Capaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Program PNPM-MP di Kecamatan Sawang

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet,

maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya. kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan harus dapat terealisasi sesuai dengan target. Dalam kelancaran proses pelaksanaan kegiatan diperlukan kemampuan pelaku PNPM-MP yang lebih baik dan partisipasi masyarakat.

Secara resmi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dinyatakan selesai jika telah diserahkan kepada masyarakat dalam MDST dan setelah ditandatangani SP3K oleh Ketua TPK dan PjOK serta diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati. di Kecamatan Sawang tingkat capaiannya secara umum rata-rata 100 %, meskipun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa

kendala, baik dari kegiatan sarana prasarana maupun kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Progresnya dapat kita perhatikan dari hasil laporan kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) maupun dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan Fasilitator Kecamatan / Fasilitator Teknik, dan juga dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Hasil wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan selaku PJOK

“ Hasil pelaksanaan tahapan kegiatan PNPM umumnya lancar, baik kegiatan sarana prasarana dan SPP umumnya juga lancar. saya selaku penanggung jawab di Kecamatan Sawang selalu mendukung program kegiatan PNPM, setiap tahapan musyawarah yang dilaksanakan oleh Fasilitator saya menyediakan waktu untuk menghadirinya dan melakukan pembinaan ke lapangan. Proses pencairan dana tidak terkendala saya selalu menyediakan waktu untuk kelancaran proses pencairan dana setiap kegiatan. Ada satu kegiatan yang terkendala dalam pelaksanaan yaitu pembuatan jembatan gantung di Gampong Lhokjok, terkendala karena biaya yang dibutuhkan tidak tercukupi dengan dana di PNPM, maka untuk penyelesaian kegiatan tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat dan dalam hal ini kekurangan dana tersebut sudah tertutupi dengan dana swadaya masyarakat. Jembatan tersebut sekarang dalam proses penyelesaian”(wawancara 18 Nopember 2012).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa PJOK memberikan dukungan dan pembinaan untuk kelancaran realisasi kegiatan PNPM di Kecamatan Sawang, apabila ada hambatan PJOK bersama pejabat kecamatan lain mencari solusi dengan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian kegiatan program.

Hasil wawancara dengan pak Rahmad Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Sawang, menjelaskan sebagai berikut :

“ Kegiatan untuk proyek fisik ada 20 kegiatan baik yang bersumber dari PNPM dan dari APBD. Sejauh ini semua pekerjaan masih sesuai target Koordinasi yang dilakukan dengan pihak kecamatan baik dengan Camat dan PJOK, kami memberi laporan yg upto data ke kekecamatan. Baik camat dan PJOK sambutannya bagus, Koordinasi diantara kami sesama FK/FT saling mendiskusikan terhadap hal – hal yang menyangkut progres kegiatan dan permasalahan yang ada, Setiap akhir minggu diusahakan bisa sharing bersama membahas mengenai persoalan –persoalan program dan mencari pemecahannya” (wawancara, 20 Nopember 2012).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan masih sesuai target, laporan pertanggung jawaban selalu diberikan ke pihak kecamatan, koordinasi yang dibangun bagus, dan dukungan dan binaan yang diberikan ke pihak kecamatan bagus. Namun untuk kemampuan pelaku program di gampong pada bulan-bulan terakhir agak menurun diperlukan dukungan, arahan dan pembinaan supaya mereka dapat meningkatkan kualitas dan semangat kerja dalam menjalankan program.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Sawang Abdullah sebagai berikut: :

“Pelaksanaan kegiatan umumnya lancar. Rapat-rapat setiap bulan tetap kami laksanakan. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan mereka berkonsultasi dan kami berikan arahan-arahan. Kemudian Setiap kegiatan tahapan musyawarah di Kecamatan kami selalu dampingi karena perlu arahan yang disampaikan kepada peserta rapat karena peserta rapat yang kita undang adalah dari semua gampong diperlukan pembinaan dan arahan. Kegiatan PNPM keberhasilannya lebih luas”, (Wawancaram, 21 Nopember 2012).

Beliau juga menjelaskan :

“Hubungan koordinasi bagus antara pihak PNPM dengan kami di kecamatan, sebagai mitra kerja, kerjasama selama ini bagus. Dukungan Camat terhadap kegiatan PNPM bagus. Kegiatan PNPM tidak banyak campur tangan kami pihak kecamatan, mereka Pihak PNPM sendiri telah dapat menyelesaikan sendiri dan apabila ada permasalahan mereka selalu berkonsultasi untuk mendapatkan arahan dan pembinaan” (wawancara, 21 Nopember 2012).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan umumnya program kegiatan PNPM di Kecamatan Sawang ke berhasilannya lebih luas dan terutama untuk pelaksanaan tahapan kegiatan berjalan lancar dan koordinasi yang dibangun oleh fasilitator dengan pihak kecamatan bagus, dan pihak ke kecamatan sangat mendukung kelancaran program, dan pihak kecamatan selalu mendampingi dan memberikan arahan dan pembinaan untuk kelancaran pelaksanaan program.

Wawancara dengan Pak Mukhlis sebagai Ketua Tim Pelaksana DOK sebagai berikut :

“Pelatihan- pelatihan yang dilaksanakan untuk pelaku PPK Gampong yaitu pelatihan TPK dan pelatihan Geuchilk. Hasil evaluasi progres kegiatan PNPM, capaian tujuan program pemberdayaan masyarakat, untuk kemandirian, masyarakat belum siap melaksanakan program secara mandiri mereka belum mampu, masih membutuhkan pendampingan” (Wawancara, 21 Nopember 2012).

Wawancara dengan Pak Azhari,ST menjelaskan bahwa : “Hasil evaluasi progres kegiatan PNPM, capaian tujuan program pemberdayaan masyarakat, untuk kemandirian, masyarakat belum siap melaksanakan program secara mandiri mereka belum mampu, masih membutuhkan pendampingan, sehingga masih membutuhkan program pemberdayaan masyarakat”.

Wawancara dengan Fasilitator Teknik Kecamatan Sawang, Bapak Azhari, ST., menjelaskan sebagai berikut :

“ (1) hasil realisasi kegiatan pada tahun 2012 berkisar 99,68 % yaitu dari 20 kegiatan yang ada hanya satu kegiatan belum rampung, terlambat penyelesaian dikarenakan kurang disiplinnya tukang dalam menyelesaikan pekerjaan, setelah diganti maka pembangunan gedung tersebut sudah selesai dikerjakan, sedangkan untuk jembatan titi gantung dengan besarnya dana yang teralokasi dari dana PNPM selesai sampai target, sisanya untuk lantai papan dialokasikan dengan dana swadaya dan pada maret 2013 telah selesai dikerjakan.

“(2) Dampak hasil pelaksanaan kegiatan PNPM bagi masyarakat sangat banyak diantaranya; (1) dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan program mereka memperoleh pendapatan dan pembelajaran baik skill maupun pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan program, (2) masyarakat yang terlibat dalam kelompok usaha mereka mendapat tambahan modal dari dana simpan pinjam, mereka juga terlatih, dan memperoleh pendampingan mengelola dana program (3) dengan tersedianya Puskesmas pembantu dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan banyak manfaat lainnya yang lebih besar; (4). Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat pelaku PNPM di gampung seperti TPK, UPK, KPMD telah meningkatkan skill mereka dalam mengelola program dan penguatan kelembagaan. Pelatihan geuchik dan juga pelatihan Tuha phet yang dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan *gampong* (desa)”, (wawancara, 20 Maret 2013).

Bapak Mukhlis, ST, juga menjelaskan bahwa “ditinjau dari ruang lingkup yang lebih luas; dengan adanya kegiatan Program PNPM , dampak dari hasil realisasi kegiatan untuk masyarakat lebih besar, diantaranya dengan selesainya

kegiatan pembangunan fisik telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu misalnya kegiatan pembangunan titi gantung, perluasan jalan dan jalan rabat beton telah memudahkan dan memperlancar arus lalu lintas pengangkutan usaha masyarakat untuk dibawa ke kota sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil, efisiensi waktu yang ditempuh, dengan adanya irigasi telah meningkatkan hasil panen, sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar, memudahkan anak-anak sekolah dan masyarakat lainnya untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, perkembangan kemajuan desa lebih cepat dengan pengadaan dan perbaikan infrastruktur, (wawancara, 20 Maret 2013)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa hasil dari realisasi kegiatan program PNPM telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat baik berupa peningkatan pendapatan dengan lancarannya arus lalu lintas dan meningkatnya hasil panen dengan tersedianya irigasi, memperoleh upah dan skill dan pembelajaran mengelola program. Juga mempercepat kemajuan desa dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur, memperoleh fasilitas kesehatan, tersedianya gedung pertemuan untuk ibu-ibu

Hasil wawancara dengan Hasbi sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sawang, menjelaskan sebagai berikut :

“ Dengan adanya musyawarah sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh pelaku PNPM kepada masyarakat, dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan program PNPM bagus., kehadirannya pada pelaksanaan tahapan kegiatan PNPM baik, dukungan dan kerjasama baik”, (wawancara, 21 Maret 2013)

Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sawang, Fajri M.Saleh,S.Pd menjelaskan:

“ Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kegiatan SPP yang bersumber dari dana PNPM adanya perubahan peningkatan bagi ekonomi masyarakat, diantaranya dengan ada program SPP telah menambah modal usaha bagi masyarakat lemah, kemudian dengan tersedianya irigasi hasil panen sudah meningkat, dengan adanya jalan usaha tani telah memperlancar arus lalu lintas, sudah dapat menghemat / memperkecil biaya yang dikeluarkan petani untuk mengangkut hasil panen untuk dibawa ke kota” (wawancara, 22 Maret 2013).

Hasil wawancara dengan Geuchik *gampong* Rambong Payong, menjelaskan sebagai berikut :

“ Desa Rambong Payong mengusulkan Pembangunan Polindes dengan dana 100 juta yang bersumber dari dana PNPM 2012, dari dana BKPG kami memprioritaskan pembuatan saluran pembuang, dampak yang dapat dimanfaatkan masyarakat sangat besar dengan adanya polindes telah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, saluran pembuang tanah sawah yang rendah selama ini tergenang air telah dapat dialirkan (pemerataan air ke tanah sawah yang lain) sehingga telah menghasilkan peningkatan hasil panen, dengan adanya jalan lingkungan telah memudahkan arus lalu lintas, sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih kecil, dari hasil penjualan hasil panen telah menambah pendapatan masyarakat.

Kemampuan Pelaku PNPM dan Partisipasi Masyarakat

Hasil wawancara dengan Pak Rahmat menjelaskan :

“Dilihat dari kinerja pelaku PPK di Tingkat desa akhir-akhir ini kinerja menurun kinerja pelaku PPK di tingkat *gampong* untuk akhir-akhir ini sedikit agak kurang, TPK diharapkan setiap bulan ada peningkatan progres. Dalam setiap pelaksanaan proyek setiap tahapan mereka harus membuat laporan, dan yang menjadi kendala hasil pelaporan yang mereka buat hasilnya

masih lemah, laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat masih membutuhkan verifikasi ulang, yang menjadi salah satu penyebabnya adalah TPK jarang ke kantor kecamatan, kurang konsultasi terhadap permasalahan yang ada, FK harus jemput bola turun ke lapangan”(wawancara, 20 Nopember2012) .

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kemampuan pelaku program di *gampong* pada bulan-bulan terakhir agak menurun diperlukan dukungan, arahan dan pembinaan supaya mereka dapat meningkatkan kualitas dan semangat kerja dalam menjalankan program.

Hasil wawancara dengan Fasilitator Keuangan Kabupaten, Pak Husnul Fuad, menjelaskan bahwa :

“Kemampuan pelaku Kecamatan pada umumnya sudah profesional dalam melaksanakan kegiatan, mereka bertanggung jawab terhadap tugas, penyerahan laporan tepat waktu, koordinasi bagus, namun untuk pelaku di tingkat *gampong* kemampuan masih lemah dan perlu terus dilakukan pendekatan, arahan , pembinaan baik melalui pelatihan, bimbingan kerja oleh Fasilitator dan peningkatan motivasi. Dari hasil evaluasi kemampuan pelaku *gampong* setelah mendapatkan pelatihan dan bimbingan lebih baik dari sebelumnya untuk saat ini mereka sudah dapat membuat LPJ walaupun masih perlu perbaikan dan masih perlu bimbingan”, Wawancara, 19 Maret 2013

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, kemampuan pelaku PNPM di tingkat kecamatan sudah profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga bagus, namun kemampuan pelaku PNPM di tingkat desa (*gampong*) yang masih rendah perlu ditingkatkan pembinaan dan pelatihan dan pemdampingan supaya kinerjanya dapat ditingkatkan.

Hasil wawancara dengan Hasbi sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sawang, menjelaskan sebagai berikut :

“ Dengan adanya musyawarah sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh pelaku PNPM kepada masyarakat, dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap realisasi pelaksanaan

kegiatan program PNPM bagus., kehadirannya pada pelaksanaan tahapan kegiatan PNPM baik, dukungan dan kerjasama baik”, (wawancara, 21 Maret 2013)

Hasil wawancara dengan Pak Hasbi selaku Ketua UPK Kec. Sawang menjelaskan bahwa :

“Manfaat pelatihan sangat besar untuk meningkatkan skill masyarakat diantaranya pelatihan yang diberikan kepada pelaku PNPM (TPK) di gampong telah dapat meningkatkan peningkatan kinerja pelaku, yang pada awalnya mereka tidak bisa membuat Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun setelah diberikan pelatihan sudah ada peningkatan mereka sudah bisa membuat program meskipun masih perlu arahan untuk perbaikan”, (wawancara, 21 Maret 2013).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, untuk kemampuan pelaku program di desa (gampong) masih lemah, mereka belum mandiri dalam melaksanakan kegiatan program di gampong masih membutuhkan pendampingan, dan masih perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan pelaku gampong dan perlu arahan-arahan, pembinaan dan pendampingan.

Hasil wawancara dengan Pak Bakhtiar, menjelaskan:

“ masyarakat sangat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di gampong, kehadiran dalam rapat yang diadakan di gampong bagus, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam program misalnya sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM kemampuan mereka dalam mengelola program memadai, dan mereka bertanggung jawab”, (wawancara, 22 Maret 2013).

4.5 Mekanisme Penanganan Permasalahan Dalam Program PNPM MP

Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM cenderung program kegiatan yang bermasalah adalah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dibandingkan dengan kegiatan pembangunan fisik. Sehingga disini lebih dominan yang

dibahas tentang kegiatan yang bermasalah adalah kegiatan Simpan_Pinjam Perempuan (SPP). Pinjaman bermasalah disebabkan oleh berbagai sumber dan memerlukan penanganan yang sesuai. Penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang dirasakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beberapa materi pola penyelesaian pinjaman bermasalah telah diterapkan di lapangan. Namun hasilnya masih belum optimal yang disebabkan terutama oleh tidak berfungsinya kelembagaan kelompok, terbatasnya pendanaan operasional, dan provokasi yang bersifat negatif.

Pada sisi lain pola penyelesaian pinjaman bermasalah disamaratakan pada semua pinjaman bermasalah tanpa dilakukan identifikasi, verifikasi maupun validasi penyebab permasalahan sehingga sering pola penyelesaian yang diterapkan tidak sesuai dengan penyebab permasalahan dan mengakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian.

Upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian pinjaman bermasalah sering menghadapi kendala persyaratan aturan dan tahapan yang belum dipersiapkan sesuai dengan ketentuan sehingga sering dikembalikan dengan alasan belum memenuhi syarat dilanjutkan kasusnya, yang mengakibatkan masyarakat mempunyai keengganan untuk melakukan proses hukum.

Pengelolaan Perguliran merupakan upaya menjaga kualitas/mutu dari kredit/pinjaman yang diberikan oleh UPK kepada Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi dampingan di wilayah kecamatan. Agar dapat memperoleh hasil yang multi guna, maka proses Perguliran harus ditaati/dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan UPK

Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Pinjaman bermasalah yang juga sering disebut *non performing loan* (NPL), dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan jasa pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan (dipinjamkan).

Penilaian kolektibilitas Pinjaman digolongkan ke dalam 5 kelompok:

- Lancar (pass)
- Dalam *perhatian* khusus (*special mention*)

- Kurang lancar (*substandard*)
- Diragukan (*doubtful*)
- Macet (*loss*)

Persyaratan yang ketat dalam kebijakan perguliran akan mengurangi kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah-masalah seperti terjadinya *default* atau penunggakan pembayaran. Kecenderungan kerugian yang timbul dari pinjaman yang disalurkan pada dasarnya antara lain dikarenakan kurangnya perhatian UPK secara serius setelah pinjaman tersebut berjalan. Di samping itu, minimnya analisis yang dilakukan pada saat menerima pengajuan proposal pinjaman sampai dengan verifikasi pinjaman. Ada 3 hal utama yang menyebabkan munculnya pinjaman bermasalah;

- a. Lemahnya aspek kepatuhan, hal ini menyangkut dengan tertib atau tidaknya penegakan terhadap aturan tentang sistem dan mekanisme pemberian pinjaman, aspek legal sebuah pemberian pinjaman sering terabaikan
- b. Lemahnya pengawasan sejak dini, dimulai dari pengambilan keputusan dan penetapannya, saat pemberian pinjaman atau pendanaan sampai dengan saat pinjaman tersebut telah diterima oleh kelompok
- c. Lemahnya pembinaan dilapangan, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah atau mempersempit ruang penyalahgunaan dan menurunnya itikad baik dari kelompok/pemanfaat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Drs. Armia Nurdin Fasiitator Kecamatan (FK), sistem penanganan masalah di program PNPM dilakukan berjenjang dan sesuai dengan kategori masalah, sebagaimana penjelasannya berikut ini :

“Penanganan masalah di PNPM ditangani secara berjenjang, katagori satu adalah apabila ada persoalan dan permasalahan di tingkat desa berarti diselesaikan oleh pihak desa yg disupport oleh pihak kecamatan perlu bek up dari FK,FT, ataupun camat / PJOK). Untuk kategori II . Apabila ada persoalan/permasalahan di tingkat kecamatan yang menyangkut dengan tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM yg kadang tidak dapat dilaksanakan oleh FK FT jadi perlu

penanganan bantuan suport dari pihak kabupaten misalnya dari konsultan manajemen. Sedangkan untuk kategori III adalah apabila ada permasalahan di tingkat kabupaten diselesaikan oleh pihak kabupaten dan dalam penanganannya perlu mendapat suport dari pihak propinsi”

Kemudian Pak Drs. Armia Nurdin juga menjelaskan bahwa :

“Penanganan permasalahan kegiatan kelompok SPP, pertama dilakukan identifikasi kelompok untuk mengetahui kelompok tsb termasuk golongan masalah yang bagaimana, karena masalah di SPP ada kategory misalnya pertama permasalahan ttg mecrovenon yg menyangkut masalah kemampuan kelompok misalnya masalah tempat, pasar, keuangan. Ke dua Jenis masalah kelembagaan katakanlah, ttg pertemuan kelompok, masalah adm / pencatatan. Ketiga masalah penyelewengan dana, misalnya dilakukan oleh kelompok katakanlah anggota menyettor ke ketua, ketua tidak menyettor ke kecamatan itu adalah prenyelewengan, ketua UPK penuh menyettor ke ketua kelompok, ke tua tidak penuh menyettor ke anggota kelompok terjadi pemotongan berarti itu penyelewengan. kelompok tidak menyettor ke anggota., ada jenis masalah pos mejer misal gagal panen, kebakaran , huru hara, perang , banjir. Apabila identifikasi masalah sudah dilakukan maka kalau sudah jelas jenis masalah maka sistem penanganannya ada pemberian skor kpd kelompok yang bermasalah berdasarkan kategori masalah. Masalah Bencana alam perlu dilakukan ferifikasi apakah bencana alam tsb dialami oleh satu orang atau oleh semua anggota kelompok, maka apabila bencana tsb dialami oleh satu orang maka hanya satu orang yang tidak perlu melakukan pengembalian pinjaman sedangkan anggota lainnya wajib melakukan pengembalian pinjaman. Permasalahan kelembagaan sistem penanganan adalah proses penyelesaiannya bisa dilakukan pejadwalan ulang, misalnya ada sisa yg tidak terbayar oleh kelompok sebesar 5 juta maka diperlukan penjadwalan

ulang dengan waktu 6 bulan untuk pengembalian sisa pinjaman. proses penanganannya dilakukan oleh pelaku pihak kecamatan yaitu (FK/FT dan tim penyehatan pinjaman)”.

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa petugas fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di Petunjuk Operasional, dan dalam penyelesaiannya dilakukan koordinasi yang baik antara pelaku gampong, kecamatan dan berkonsultasi dengan pihak kabupaten dan binaan juga dukungan diberikan oleh pihak Propinsi, supaya dapat meminimalisir permasalahan yang ada di lapangan.

Hasil wawancara dengan pak Rahmad Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Sawang, menjelaskan sebagai berikut :

“Perkembangan Kelompok SPP dari seratusan kelompok yang ada, yg bermasalah sekitar 11 kelompok. dan untuk 4 kelompok terkena katagori 5. mereka tidak membayar setoran pinjaman sudah lima bulan ke atas. Penanganannya dilakukan dalam beberapa tahapan, tahap pertama sekali kita mengundang kelompok untuk meminta keterangan terhadap tunggakan dan meminta jaminan kepastian pengembalian pinjaman. Dari kelompok yang bermasalah memperoleh keterangan diantaranya permasalahan kelompok SPP Gampong Lancok lokasinya jauh dari kantor kecamatan, ada yang tidak tepat sasaran, anggota kelompok mempercayai satu orang keluarga gampong, untuk menyetor iuran ke kecamatan, 1,2,3 bulan setorannya lancar. Kemudian pada bulan berikutnya setoran anggota kelompok tidak disampaikan lagi ke kecamatan sedangkan dia menerima setoran dari anggota kelompok tapi dia tidak menyetor ke kecamatan. Untuk penanganannya Pendekatan yang dilakukan adalah untuk tahap pertama disurati untuk datang ke kecamatan memberi keterangan terhadap tunggakan tersebut, kenapa iuran anggota tidak disetor ke kecamatan. Jika tidak hadir dilanjutkan

pendekatan yang ke dua dan seterusnya sesuai dengan mekanisme” (wawancara, 21 Nopember 2012)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kelompok yang bermasalah di Kecamatan Sawang hanya 4 gampong (36,%), dan telah dilakukan pembinaan untuk penyelesaian masalah yang dilakukan dengan mekanisme ber tahap pendekatan satu, dua dan tiga dan selanjutnya terus dilakukan untuk penyelesaian masalah.

Hasil wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan selaku PJOK

- “Besarnya dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bisa diterima kelompok adalah untuk kecamatan Sawang jumlah maksimal 10 juta, 7 juta, dan minimal 5 juta. per kelompok terdiri dari 10 orang anggota, 7 anggota dan 5 anggota. Apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM penyelesaian pihak gampong, dan Asisten dipanggil ke kecamatan untuk dilakukan pembinaan oleh pihak kecamatan bersama dengan Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik dengan memberi pengarahan kepada pelaku gampong, Asisten (Pendamping Lokal) dan Unit Pengelola Kecamatan (UPK).”(wawancara 18 Nopember 2012).

Wawancara dengan Pak Mukhlis sebagai Ketua Tim Pelaksana DOK sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di tingkat Gampong terdapat kendala diantaranya Tuha Pheut Gampong kurang terlibat dalam kegiatan. Pengelolaan SPP juga ada beberapa kendala diantaranya ada kelompok yang tidak lancar pengembalian pinjaman terjadi tunggakan, disebabkan karena tidak tepat sasaran orang yang dipercayakan kelompok untuk menyetor setoran pinjaman anggota ke kecamatan tetapi tidak disetor, sedangkan anggota kelompok sudah menyetor kepada orang tersebut”

Hasil wawancara dengan Pak Azhari, SE selaku Fasilitator Teknik sebagai berikut :

“Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, Tunggakan pokok masih banyak masalah misalnya kelembagaan ditangani secara langsung turun ke gampong untuk melakukan pembinaan ke kelompok yg bermasalah, untuk kecamatan Sawang kelompok masalah dari kategori 2 s,p 5. Untuk kelompok masalah yg kategori 5 sebanyak 3 kelompok, penanganannya harus dilakukan oleh Tim penyehatan. Untuk kelompok kategori 2 dan 3 ini masih tanggung jawab dari pihak kecamatan untuk pembinaan” (wawancara, 21 Nopember 2012).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan ada beberapa permasalahan dalam kelompok simpan pinjam Perempuan PNPM di Kecamatan Sawang, untuk penyelesaiannya disamping dipanggil ke kecamatan seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara di atas, pelaku kecamatan juga turun ke gampong – gampong untuk melakukan pembinaan kepada kelompok yang bermasalah yang dilakukan sesuai dengan mekanisme program PNPM.

Hasil wawancara dengan ketua Kelompok SPP, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Kami kelompok Bunga Mawar mendapatkan Kucuran dana SPP “. tahun 2011 sebesar Rp. 32.000.000,- jumlah anggota kelompok sebanyak 16 orang untuk masing-masing anggota sebesar Rp. 2.000.000,- kegiatan usaha anggota umumnya jualan. Mengenai pengembalian pinjaman untuk bulan-bulan awal pengembalian pinjaman lancar, namun saat bulan-bulan terakhir terjadi tunggakan selama dua bulan sebesar 6 juta dikarenakan bertepatan hari raya idul fitri. Kami sebagai ketua kelompok akan terus menagih supaya tunggakan tersebut dapat segera diselesaikan”(Wawancara, 23 Nopember 2012).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa permasalahan kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan dalam program PNPM, hambatannya pada pengembalian pinjaman sering terjadi tunggakan pada bulan – bulan pengeluaran rumah tangga lebih besar misalnya menyambut hari raya (Idul Fitri), kemudian ketua kelompok akan berupaya terus melakukan pendekatan kepada anggota untuk penyelesaiannya.

Hasil wawancara dengan masyarakat gampong Tarakan (Muhammad Junet) menyatakan bahwa :

“ Dana Simpan Pinjam Perempuan telah banyak membantu penambahan modal bagi kelompok ibu-ibu, namun masih terdapat kelompok yang salah merekrut anggota, sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran yang seharusnya buat kaum ibu yang miskin yang membutuhkan dana, tapi tidak memperoleh, disalurkan kepada ibu-ibu yang memiliki modal (ekonomi mapan). (wawancara, 21 Maret 2013).

Hasil wawancara dengan Ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Desa Lhok Cut, menyatakan sebagai berikut :

“ Kelompok simpan pinjam (SPP) sudah berjalan 2 (dua) tahun, pengembalian dana berjalan lancar, pinjaman modal per orang paling kecil 4 juta, namun belum berani digulirkan ke kelompok baru, masih disalurkan ke kelompok awal. dikhawatirkan tidak berjalan dan pengembalian macet”.

4.6 PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi Kegiatan Program PNPM di Kecamatan Sawang.

Sesuai yang telah diutarakan di atas tahapan evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan

kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program.

Pelaku PNPM di *gampong* memiliki tanggung jawab mengirim laporan ke kecamatan dan Fasilitator kecamatan dan Fasilitator Teknik dalam menjalankan tugas mereka mempunyai kewajiban mengirimkan laporan bulanan progres kemajuan kabupaten, laporan progres kemajuan bulanan yang di terima pihak kabupaten menjadi bahan evaluasi tentang capaian target program termasuk indikator suksesnya pelaksanaan kegiatan dan indikator produktivitas kinerja pelaku program.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Dan setiap bulanan mereka membuat rapat koordinasi membahas kemajuan-kemajuan yang dicapai sesuai dengan target, dan membahas hambatan dan kendala di lapangan juga solusi yang harus dilaksanakan oleh pelaku kecamatan dan pihak *gampong*.

Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi diantaranya Indikator sukses: dan indikator kinerja. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Indikator sukses dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan,

misalnya tingkat partisipasi, tingkat perkembangan kelembagaan, dan jumlah prasarana sarana yang terbangun. Indikator kinerja : Dirumuskan dari tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya adakah peningkatan partisipasi masyarakat, adakah peningkatan kualitas kelembagaan, dan adakah peningkatan anggaran yang *pro poor* dari Pemda.

Evaluasi kegiatan dalam PNPM juga dapat dilaksanakan padatahapan awal yaitu sebelum perencanaan kegiatan diusulkan, Pada tahapan awal evaluasi pelaku PNPM bersama masyarakat mengintensifikasi masalah yang ada dimasyarakat, memetakan masalah dan hasilnya dapat menjadi dokumen yang akan ajukan dalam rencana usulan dan yang menjadi priorita kegiatan yang akan diusulkan.

Hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat realisasi kegiatan khususnya tingkat realisasi pembangunan fisik umumnya tercapai target hanya sebagian kecil yaitu satu kegiatan belum maksimal selesai, ini menunjukkan indikator sukses tercapai meskipun belum mencapai 100 %. Ini disebabkan karena dukungan masyarakat dan motivasi yang besar dari pelaku dan adanya pendampingan dan bimbingan dan pengarahan yang maksimal dari pihak kecamatan. Namun untuk mengukur hasil indikator kinerja tentunya harus mendapat rekomendasi yang berwenang bahwa kegiatan program yang telah dilaksanakan mempunyai kualitas yang baik (standar). Ditinjau dari kemampuan pelaku di gampong skill nya masih kurang masih membutuhkan pendampingan, mereka belum mandiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan terutama dalam menyiapkan dokumen perencanaan, melakukan desain dan administrasi laporang pertanggungjawaban dan administrasi pengelolaan keuangan. Tingkat partisipasi pasif berupa dukungan masyarakat sudah baik, namun tingkat partisipasi aktif perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan maupun sosialisasi. Bahwa manfaat program yang dihasilkan adalah untuk masyarakat banyak . Dampak hasil program dari pembangunan fisik manfaatnya sangat signifikan untuk kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun ditinjau dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) belum menyentuh banyak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha. Karena penerima manfaat belum maksimal menggunakan dana untuk pengembangan usaha walaupun ada anggota yang lancar pengembalian pinjaman, namun ada sebagian dari mereka memanfaatkan untuk keperluan konsumtif. Dan masih ada kelompok yang terkategori kelompok bermasalah karena terjadi tunggakan pinjaman. Dan masih ada perekrutan anggota kelompok yang tidak memenuhi syarat sehingga distribusi dana SPP menjadi tidak tepat sasaran, dan belum ada kelompok yang melakukan sistem perguliran ke kelompok baru.

Mekanisme Penanganan Permasalahan Dalam Program PNPM-MPd di Kecamatan Sawang

Dalam program PNPM mekanisme penanganan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ditinjau dari kategori masalah dan penanganannya dilakukan secara berjenjang. Kategori satu adalah apabila ada persoalan dan permasalahan di tingkat desa berarti diselesaikan oleh pihak desa yg disupport oleh pihak kecamatan perlu bek up dari FK,FT, ataupun Camat / PJOK). Untuk kategori II . Apabila ada persoalan/permasalahan di tingkat kecamatan yang menyangkut dengan tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM yg kadang tidak dapat dilaksanakan oleh FK FT jadi perlu penanganan bantuan arahan dari pihak kabupaten misalnya dari konsultan manajemen. Sedangkan untuk kategori III adalah apabila ada permasalahan di tingkat kabupaten diselesaikan oleh pihak kabupaten dan dalam penanganannya perlu mendapat arahan dari pihak propinsi” Untuk kecamatan Sawang sementara ini permasalahan kegiatan pembangunan fisik yang (Titi gantung) terdapat kendala tidak mencukupi dana yang teralokasi dari dana PNPM maka solusi yang ditempuh pihak Fasilitator dengan pihak kecamatan (PJOK/Camat) dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi menutupi kekurangan dana dengan swadaya masyarakat, dan pada bulan Maret dari hasil audit pihak Inspektorat jembatan tersebut sudah terselesaikan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menyangkut masalah kemampuan kelompok diantaranya masalah tempat, pasar, keuangan, maka diperlukan solusi yaitu dapat dilakukan pendekatan dengan pihak berwenang, memberikan arahan dan petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan. Ke dua Jenis masalah kelembagaan, masalah adm / pencatatan mereka akan diberikan bimbingan, dan pelatihan – pelatihan untuk penguatan skill mereka. Ketiga masalah penyelewengan dana dilakukan penyelesaian sesuai dengan kategori. ada jenis masalah pos mejer misal gagal panen, kebakaran , huru hara, perang , banjir. Apabila identifikasi masalah sudah dilakukan maka kalau sudah jelas jenis masalah maka sistem penanganannya berdasarkan kategori masalah. Masalah Bencana alam perlu dilakukan verifikasi. Permasalahan kelembagaan sistem penanganan adalah proses penyelesaiannya bisa dilakukan pejadwalan ulang, proses penanganannya dilakukan oleh pelaku pihak kecamatan yaitu (FK/FT dan tim penyehatan pinjaman)”.

Bab 5

KESIMPULAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. **PNPM mandiri perdesaan adalah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.**

Hasil evaluasi perkembangan Program PNPM di Kecamatan Sawang untuk realisasi kegiatan pembangunan fisik Tahun 2012 sudah bagus rata-rata gampong tercapai target, untuk keseluruhan mencapai 99,68 %, yaitu dari 20 kegiatan yang diusulkan / diprioritaskan hanya 1 kegiatan yang belum sempurna selesai dikerjakan (gedung PKK) gampong Blang Kabu. Dampak manfaat program terhadap masyarakat sangat besar baik untuk peningkatan pendapatan dengan tersedianya sarana lalu lintas dan sarana/prasarana pertanian seperti irigasi, peningkatan pelayanan kesehatan dengan tersedianya Puskesmas Pembantu, untuk peningkatan modal usaha belum menunjukkan hasil yang signifikan karena belum berjalan sistem perguliran secara maksimal, masih ada kelompok yang terkategori masalah, masih ada yang tidak tepat sasaran. Kemampuan pelaku PNPM di desa adanya peningkatan setelah dilakukan beberapa pelatihan penguatan skill. Peningkatan pembangunan sarana / prasarana infrastruktur dan penguatan kelembagaan mempercepat kejauan *gampong*

Mekanisme Penanganan masalah dalam Program PNPM dilakukan secara berjenjang dan dilakukan koordinasi baik dengan pihak kecamatan, dan pihak kabupaten juga meminta pengarahannya dan pembinaan dari pihak Propinsi.

This page is intentionally left blank

BIBLIOGRAFI

- Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan (2008), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Depdagri, Jakarta
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan model-model pemberdayaan, Gava Media
- Usman, Sunyoto, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Jakarta,
- Indrawijaya, Adam Ibrahim dan Pranoto (2011), Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional), Penerbit Alfabeta Bandung.
- Soetomo , 2008, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Bandung
- Ife Jim dan Tesoriero Frank, 2008, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Community development, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Nawawi, Ismail, 2006, Pembangunan dan Problema Masyarakat, Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi, CV, Putra Media Nusantara, Surabaya

Lampiran 1

Tabel 1

Tahapan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah

TAHAPAN PENGELOLAAN PINJAMAN BERMASALAH						
NO	TAHAPAN	OUTPUT	PESERTA	PENANGGUNG JAWAB	PENDAMPING	
1	IDENTIFIKASI DATA TUNGGAKAN KELOMPOK	DAFTAR SEMENTARA BERDASARKAN LPP & KOLEK	UPK	UPK	FK / FT / BKAD / BP-UPK	
2	MUSYAWARAH KELOMPOK	IDENTIFIKASI, VALIDASI, BAPAN PENYELESAIAN / PERNYATAAN	ANGGOTA KELOMPOK, UPK	UPK	FK / FT / BKAD / BP-UPK	
3	MUSYAWARAH DI TINGKAT DESA	SOSIALISASI HASIL MUSYAWARAH KELOMPOK / USULAN PENYELESAIAN	PENGURUS KELOMPOK, UPK, APARAT DESA	UPK	FK / FT / BKAD / BP-UPK	
4	PENYUSUNAN DAFTAR VALIDASI PINJAMAN BERMASALAH	DAFTAR VALIDASI PINJAMAN BERMASALAH	UPK	UPK	FK / FT / BKAD / BP-UPK	
4	PENYUSUNAN DAFTAR VALIDASI PINJAMAN BERMASALAH	DAFTAR VALIDASI PINJAMAN BERMASALAH	UPK	FK / FT / BKAD / BP-UPK	CAMAT/PJOK/KADE S	
5	MUSYAWARAH BKAD (MAD)	PENETAPAN POLA PENYELESAIAN, JADWAL	WAKIL DESA, BKAD, UPK, BP-UPK, TV,	BKAD	FK / FT / FASKA B	CAMAT/PJOK/KADE S

			PJOK			
6	MUSYAWARA H BKAD (BULANAN)	PROGRES, UPDATING DATA	BKAD, UPK, BP- UPK, TV, PJOK	BKAD	FK / FT / FASKA B	CAMAT/PJOK/KADE S

This page is intentionally left blank

BIODATA Tim Penulis

Ti Aiyah, S.Sos, MSP, lahir di Tempok Teungoh Kota Lhokseumawe, 15 Desember 1964. Menyelesaikan Sekolah Dasar di Teumpok Teungoh, SMP dan SMEA Negeri di Kota Lhokseumawe, menyelesaikan Jenjang Strata satu di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, dan Strata dua di USU Medan pada Tahun 2005. Pangkat Penata Tk.I, III/d , Jabatan Fungsional Lektor Kepala.

Pekerjaan:

Staf Pengajar Tetap / UNIMAL Tahun 2000 Pengangkatan PNS Tahun 2001 s.d sekarang,
Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2002
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dari Tahun 2002, 2006 – 2012
Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh Tahun 2003
Pembantu Dekan Bidang Informasi, Perencanaan dan Kerjasama FISIP UNIMAL

Publikasi / Buku

- Perlawanan Darul Islam Aceh, Analisis Sosial Politik Pemberontakan Regional di Indonesia 1953-1964, Tahun Terbit 2008 (Anggota Tim Penulis)
Evaluasi Perkembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Sawang Tahun 2014-

Penelitian/Karya ilmiah

- Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Kerja dan Produktivitas Kerja Pegawai Tahun 2004
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja PNS Pada Era Otonomi Daerah Tahun 2004
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Pengembangan Kecamatan Di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2005, publikasi Tahun 2007
- ADIL Tahun 2006.
 - Pembangunan Masyarakat Gampong Tahun 2007

- Sekelumit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Indonesia Tahun 2008
- Kepemimpinan Wanita (jurnal suwa) Tahun 2009
- Implementasi Program Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong (BKPG) Tahun (Studi di Kabupaten Aceh Utara) (Jurnal Sosioreligi)
- Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2012
- Pembangunan Masyarakat Sebagai Proses Perubahan
- Profesional Leader (pemimpin) 2014

BAHAN AJAR

- Diktat Ilmu Administrasi (Suatu Pengantar) Tahun 2004
- Diktat Sistem Administrasi Negara Tahun 2007

T. Alfiady, S.Sos., MSP, Lahir di Desa Kumbang, 4 Januari 1979, Menyelesaikan Jenjang Strata Satu di Universitas Malikussaleh Jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2004 dan Strata Dua Program Studi Pembangunan di Universitas Sumatra Utara Medan Pada Tahun 2009, Pangkat Penata, III/c, Jabatan Fungsional Lektor. Saat Ini Menjadi Staf Pengajar FISIP Universitas Malikussaleh Tahun 2005 s.d Sekarang Dan Aktif Mengajar di Perguruan Tinggi Lainnya. Dan Sedang Menduduki Jabatan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP Universitas Malikussaleh Tahun 2008 s.d Sekarang.

Fauzi, S.Sos., MA, Tempat / Tanggal Lahir : Samalanga, 06 Mei 1968.

Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pangkat / Golongan	: Pembina, IV/a
NIP	: 196805062002121002
Perguruan Tinggi	: Universitas Malikussaleh
Jabatan Pokok	: Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Status	: Kawin
Agama	: Islam
Suku	: Aceh
Kebangsaan	: Indonesia

Alamat
Geukuh

: Jln. Banda Aceh-Medan Lr. BRI No.9 Krueng

fau_la@yahoo.co.id
HP. 0811679835

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Samalanga: Tamat Tahun 1981
2. SMP Negeri Samalanga: Tamat Tahun 1984
3. SMA Negeri Samalanga: Tamat Tahun 1987
4. Strata Satu (S1) Universitas Iskandar Muda: Tamat Tahun 1994
5. Strata Dua (S2) Universitas Kebangsaan Malaysia: Tamat Tahun 2005

PENGALAMAN ORGANISASI

1. 1988-1989 : Sekretaris Umum IPPS
2. 2006 : Ketua Bidang Pendidikan IKSM Aceh Utara
dan
Kota Lhokseumawe
3. 2008 s.d Sekarang: Penasehat Bazmal Unimal Lhokseumawe
4. 2008 s.d Sekarang: Anggota ICMI Kota Lhokseumawe
5. 2008 s.d Sekarang: Sekretaris Dewan Penasehat Barindo
Lhokseumawe

PENGALAMAN KERJA

- 1997 – 2000 Kasir AJB Bumiputera 1912. Takengon
- 2000 – Sekarang Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2002 – Menjadi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2003 – Menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2005 – Menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2006 – Menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- 2008 – Menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

PENELITIAN / TULISAN ILMIAH DI JURNAL

1. 1993 : Persepsi Ibu-Ibu Tani Terhadap Program Keluarga Berencana.
2. 2003 : Menyoal Kedaulatan Negara.
3. 2003 : Wacana Dekonstruksi Modernis (Islam) di Indonesia.
4. 2005 : Struktur Upah dan Stratifikasi Sosial di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Aceh Utara (Sebuah Tinjauan Sosiologi).
5. 2005 : Impian Negara Islam di Indonesia.
6. 2005 : Mengubah Nama Indonesia, Mungkinkah Secara Politik?
7. 2006 : Teori Politik Kekuatan Eksogen dalam Studi Tentang Kebangkitan Islam dan Penggerakan Sipil di Aceh.
8. 2007 : Peran *Aceh Monitoring Mission* (AMM) di Aceh dan Tantangan Perdamaian Pasca Kepergian AMM.
9. 2007 : Persepsi Guru Terhadap Rencana Pembangunan Guru Sesuai Dengan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara.
10. 2007 : Dampak Gempa dan Tsunami Terhadap Psikologi Guru (Studi Kasus Guru SD di Aceh Utara).
11. 2007 : Peran Sistem Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Para Siswa/Siswi (Studi di Kabupaten Aceh Utara).
12. 2007 : Aceh Pasca Kepergian AMM (*Aceh Monitoring Mission*)
13. 2007 : Restorika Politik PBB.
14. 2008 : Peran Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik Aceh.
15. 2008 : Pembantaian PKI (Analisis Sosiologis Konflik Idiologis di Aceh, 1965-1967).
16. 2009 : Transformasi Perjuangan GAM Pasca MoU Helsinki : dari Perjuangan Bersenjata ke Perjuangan Politik (Hibah Pekerti).

17. 2009 : Penyuluhan Para Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
18. 2009 : International Conference On Aceh And Indian Ocean Studies II Civil Conflict And It's Remedies, 23-24 Februari 2009 Banda Aceh.
19. 2009 : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Perkembangan Politik Aktor, Ekonomi Aktor dan Sosial Aktor.
20. 2009 : Pengaruh Organisasi Kepemerintahan dan Hubungan Kemasyarakatan di Gampong Lancang Garam Vol 3, Nomor 2 November 2009.
21. 2009 : Reintegrasi dan Rekonsiliasi : Studi Tentang Pengelolaan Program Reintegrasi Pasca Konflik di Aceh, 2006-2009. The First International Graduate Student Conference On Indonesia Desember 1-2.
22. 2010 : The Tsunami Transformation : The Analysis Of The Fair Globalization Impact And The Benefit Of International Reconstruction And Relief In Converting Disaster Into An Opportunity To Sustainable Development In The After Math Of Earth Quake Driven Tsunami In Aceh And Nias 9-10 Februari.

This page is intentionally left blank